



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF BARATA SAKTI
2. Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3. NHK : 424361

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 9.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m²/122 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1271 m²/600 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m²/214 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/132 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah Seluas 150 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 885.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS F700RG TX MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.4 G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 263.305.579**F. HARTA LAINNYA** Rp. 1.650.000.000

Sub Total Rp. 12.793.305.579



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.793.305.579

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.